

## Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Politik

M Anwar Daffa<sup>1</sup>, Galang Duta Fahrezy<sup>2</sup>, M Havid Hidayatullah<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>.

<sup>1234</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
([daffaanwar892@gmail.com](mailto:daffaanwar892@gmail.com)), ([fahrezygalang3@gmail.com](mailto:fahrezygalang3@gmail.com)), ([havid4195@gmail.com](mailto:havid4195@gmail.com)), ([siscanovaalia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaalia@radenintan.ac.id)).

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 10 Mei 2026  
Diterima 20 Mei 2026  
Diterbitkan 05 Juni 2026

#### Keywords:

Kepemimpinan Islam;  
Islam dan Politik;  
Sistem Politik;  
Politik Islam.

---

### ABSTRAK

Artikel ini menyoroti keberlangsungan Kepemimpinan dalam perspektif agama Islam merupakan konsep yang punya hubungan erat dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab di kehidupan masyarakat ataupun negara. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam Islam dan implikasinya terhadap sistem politik kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian Al-Quran dan Hadis serta literatur ilmiah yang bersangkutan dengan kepemimpinan dan politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menempatkan moralitas, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Prinsip syura atau musyawarah menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan politik sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan partisipatif. Selain itu, konsep kepemimpinan Islam memiliki relevansi terhadap sistem politik kontemporer, terutama dalam penerapan etika politik, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat menjadi landasan dalam membangun sistem politik yang stabil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan Islam dan praktik politik dalam kehidupan modern.

---

### Corresponding Author:

M Anwar Daffa,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Email: [daffaanwar892@gmail.com](mailto:daffaanwar892@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Kepemimpinan adalah unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, pengaturan kekuasaan, dan penciptaan ketertiban sosial. Dari sudut pandang Islam, kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau jabatan. Ia juga amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab, dan moralitas. Islam menempatkan pemimpin sebagai orang yang wajib menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemimpin juga harus memerintah sesuai prinsip syariat. Konsep kepemimpinan dalam Islam disebut khalifah, imam, dan ulil amri yang menunjukkan adanya. Sebenarnya, tanggung jawab besar ada pada mengatur kehidupan umat manusia. Selain itu, prinsip musyawarah atau syura menjadi bagian penting dalam proses kepemimpinan Islam. Prinsip musyawarah atau syura membantu menciptakan keputusan yang adil.

Perkembangan sistem politik modern menyebabkan konsep kepemimpinan Islam kembali menjadi perhatian dalam kajian akademik maupun praktik pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena

berbagai persoalan politik seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, lemahnya etika politik, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai kepemimpinan Islam dipandang memiliki relevansi untuk diterapkan dalam sistem politik kontemporer. Prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam dinilai mampu menjadi landasan dalam membangun pemerintah yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai kepemimpinan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan sistem politik dan tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap sistem politik modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kepemimpinan Islam. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar kepemimpinan Islam serta relevansinya dalam menciptakan sistem politik yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun praktik politik yang lebih etis dan bertanggung jawab di era modern.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teologis. Kajian difokuskan pada analisis konseptual hukum pidana Islam berdasarkan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur *fiqh al-jināyah*, dan didukung oleh buku serta jurnal ilmiah sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep, prinsip, serta implementasi hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat kontemporer.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam**

Kepemimpinan dalam Islam adalah Amanah bagi setiap orang yang diberikan jabatan. Pemimpin harus melaksanakannya dengan tanggung jawab mengacu pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Ajaran Islam menegaskan bahwa kepemimpinan menurut keadilan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan menanamkan nilai moral serta etika dalam pemerintahan. Konsep kepemimpinan dalam Islam muncul lewat istilah khalifah, imamah, dan ulil amri. Istilah-istilah itu menandakan beban berat kepemimpinan dalam mengatur dan membimbing kehidupan umat manusia. Al-Qur'an menjelaskan kepemimpinan di QS. An-Nisa ayat 58. Ayat itu menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil. Keadilan menjadi dasar utama kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus jujur, bijaksana, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Prinsip ini menjadi pedoman membangun kehidupan sosial dan politik yang harmonis.

Islam menekankan dua nilai utama: keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Amanah berarti jabatan atau kekuasaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW memperlihatkan amanah dalam setiap langkah kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagi umat Islam. Pemimpin amanah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin amanah menghindari tindakan merugikan masyarakat.

Kepemimpinan Islam berlandaskan prinsip syura atau musyawarah. Musyawarah mengarahkan pengambilan keputusan bersama, sambil mendengar pendapat dan kepentingan masyarakat. Prinsip syura atau musyawarah menegaskan bahwa Islam menghargai partisipasi publik dalam pemerintahan. Dengan musyawarah, keputusan menjadi lebih adil dan membantu menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menjadi contoh pemimpin ideal. Rasulullah SAW menerapkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan Rasulullah SAW tidak otoriter. Rasulullah SAW mengutamakan dialog dan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah umat. Rasulullah SAW juga membangun hubungan sosial harmonis dengan berbagai kelompok di Madinah. Rasulullah SAW melaksanakan hal itu lewat Piagam Madinah. Piagam Madinah menampilkan nilai toleransi dan keadilan dalam pemerintahan.

Kepemimpinan diagama Islam bukan hanya untuk pemerintahan negara, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Setiap orang adalah pemimpin dan harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab pada diri sendiri atau keluarga dan juga lingkungan sosial. Agama Islam mengharuskan bahwa kepemimpinan dimulai dengan akhlak dan karakter atau sifat yang baik. Dengan akhlak yang baik, maka kepemimpinan dapat memberikan dampak positif pada orang lain.

Di haruskan Pemimpin dalam Islam memiliki sifat-sifat seperti berikut : siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Siddiq berarti jujur. Amanah berarti dapat dipercaya. Tabligh berarti menyampaikan kebenaran. Fathanah berarti cerdas dan bijaksana. Keempat sifat ini menjadi dasar utama ciri kepemimpinan yang baik. Keempat sifat itu mendukung kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas yang tinggi. Saya melihat bahwa pemimpin yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah sangat mudah memperoleh kepercayaan masyarakatnya. Pemimpin yang memiliki keempat sifat tersebut juga akan dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Jadi, konsep kepemimpinan dalam Islam menjadikan nilai moral, spiritual, dan sosial sebagai landasan utama ketika menjalankan kekuasaan di suatu negara. Kepemimpinan bukan hanya sekadar jabatan, melainkan sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap relevan di kehidupan modern. Nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab membantu menciptakan sistem kepemimpinan yang adil dan berfokus pada kemaslahatan umat.

## B. Prinsip dan Karakteristik Kepemimpinan Islam dalam Dinamika Sistem Politik Modern

Islam dan politik, adalah dua kata yang tidak pernah sepi menjadi perbincangan (discourse) dalam khazanah intelektual muslim sebagai ideal Islam. Dalam rentang realitas sejarah Islam, banyak dari para pemikir Islam klasik, modern dan neo modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan hubungan antara Islam dan politik, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.

Dalam pemikiran politik Islam, paling tidak, terdapat tiga paradigma tentang hubungan Islam dan negara. Pertama, paradigma integralistik. Dalam perspektif ini agama dan negara menyatu (integrated). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas "kedaulatan Tuhan", karena menurut pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan". Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah. Hanya saja dalam term politik Syi'ah, untuk menyebut negara (al-daulah) diganti dengan imam (kepemimpinan). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan", negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokratis. Sementara sebagian Sunni konservatif juga mempunyai pandangan yang sama mengenai integrasi agama dan negara ini. Paradigma integralistik ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam *din wa dawlah*.

Kedua, Paradigma simbiotik, yakni mengasumsikan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam konteks ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Tampaknya, al-Mawardi, seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Sebab dalam karyanya yang fenomenal, *al-Ahkam al-aSulthaniyyah*, ia mengatakan: "Kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi keNabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia".

Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Konsep *al-dunya-al-akhirah*, *al-din-aldaulah*, *umur al-dunya-umur al-akhirah* didikotomikan secara diametral. Tokoh paradigma sekularistik, salah satunya, adalah 'Ali 'Abd al-Raziq, seorang cendekiawan muslim Mesir. Dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Ahkam*, ia menyatakan bahwa Islam hanya sebuah agama dan tidak ada kaitannya dengan urusan negara.

Dalam konteks politik modern, nilai-nilai kepemimpinan Islam tetap relevan karena menekankan pentingnya integritas moral dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan Islam tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama.

### C. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam Dalam Sistem politik

Al-Qur'an menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain, amanah, tanggung jawab, adil, syura (musyawarah),.

#### 1. Prinsip Amanah

Dalam Kamus Kontemporer (al-'Ashr), amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya).<sup>18</sup> Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan "kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah".

Ungkapan ini menurut Said Agil Husin Al-Munawwar, menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pen delegasian kewenangan dari Allah SWT (delegation of authority) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.

Mengenai Amanah ini Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ۝

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".(QS.An-nisa':58).

Dari ayat diatas jelas menunjukkan perintah Allah mengenai harus dilaksanakannya sebuah amanah. Manusia dalam melaksanakan Amanah yang dikaitkan dengan tugas kepemimpinannya memerlukan dukungan dari ilmu pengetahuan dan hidayah dari Allah. Hal ini dapat dilihat firman Allah "Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu", pengajarannya bisa lewat hidayah yang merupakan anugerah dari Allah, juga bisa melalui ilmu pengetahuan.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat. Seorang pemimpin wajib menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Konsep amanah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.

#### 2. Prinsip Tanggung Jawab Pemimpin

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT atas segala kebijakan dan tindakan yang diambil selama memimpin. Oleh karena

itu, Islam menempatkan jabatan kepemimpinan bukan sebagai bentuk kehormatan semata, melainkan sebagai kewajiban moral dan spiritual yang sangat berat.

Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi akuntabilitas yang luas, mencakup aspek sosial, hukum, ekonomi, hingga moral.

#### a. Tanggung Jawab Menegakkan Keadilan

Salah satu tanggung jawab utama pemimpin adalah menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Keadilan menjadi dasar terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemimpin tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu, melainkan harus memperlakukan seluruh masyarakat secara setara tanpa diskriminasi suku, agama, ras, maupun status sosial.

Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar pemimpin menetapkan hukum secara adil. Dalam praktik pemerintahan Islam, keadilan tidak hanya berlaku dalam bidang hukum, tetapi juga dalam distribusi ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan hak masyarakat.

Khalifah Umar bin Khattab menjadi contoh nyata pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia tidak segan menghukum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan selalu memastikan rakyat kecil memperoleh hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan inti dari tanggung jawab kepemimpinan Islam.

#### b. Tanggung Jawab Melindungi dan Menyejahterakan Rakyat

Pemimpin dalam Islam memiliki kewajiban menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, dan ancaman sosial lainnya.

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin wajib menciptakan kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan ekonomi yang adil dan pengelolaan baitul mal yang transparan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemimpin mencakup pengelolaan sumber daya negara demi kemaslahatan umat.

#### c. Tanggung Jawab Menjalankan Amanah dengan Jujur

Amanah merupakan prinsip penting dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin wajib menjalankan kekuasaan secara jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Korupsi, nepotisme, dan manipulasi kekuasaan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan ajaran agama. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan politik.

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sifat amanah sehingga dipercaya oleh masyarakat bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Keteladanan ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui perilaku yang bersih dan bertanggung jawab.

#### d. Tanggung Jawab Bermusyawarah dengan Masyarakat

Islam mengajarkan bahwa pemimpin tidak boleh bersikap otoriter dalam mengambil keputusan. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebaiknya dibahas melalui musyawarah atau syura.

Musyawarah bertujuan menciptakan keputusan yang lebih bijaksana dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya syura, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah.

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam bersifat partisipatif dan menghargai keterlibatan rakyat dalam proses politik. Pemimpin yang mengabaikan musyawarah berpotensi menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang.

#### e. Tanggung Jawab Menjadi Teladan Moral

Seorang pemimpin dalam Islam harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Perilaku pemimpin akan memengaruhi kehidupan sosial dan moral rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin dituntut memiliki akhlak mulia seperti jujur, rendah hati, disiplin, dan bertanggung jawab.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi model ideal dalam kepemimpinan Islam. Beliau memimpin dengan penuh kasih sayang, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada umat.

#### f. Tanggung Jawab Menegakkan Etika Politik

Dalam Islam, politik harus dijalankan berdasarkan etika dan moralitas. Pemimpin tidak dibenarkan menggunakan fitnah, kebohongan, intimidasi, atau cara-cara curang demi mempertahankan kekuasaan.

Etika politik Islam menekankan bahwa tujuan politik harus dicapai melalui cara-cara yang benar dan bermartabat. Oleh sebab itu, pemimpin wajib menjaga persatuan masyarakat, menghormati hak-hak oposisi, dan menghindari tindakan represif terhadap rakyat.

### 3. Prinsip Adil

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem politik Islam. Dalam pandangan Islam, tujuan utama pemerintahan adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pemimpin wajib menjadikan keadilan sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan dan menetapkan kebijakan publik. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah QS. An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa pemimpin harus menetapkan hukum secara adil. Selain itu, QS. Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Ayat

tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun politik.

#### a. Keadilan sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan

Dalam sistem politik Islam, kekuasaan yang tidak dijalankan secara adil akan kehilangan legitimasi moral. Pemimpin memperoleh kepercayaan masyarakat karena kemampuannya menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat. Oleh sebab itu, keadilan menjadi syarat penting dalam keberlangsungan pemerintahan.

Pemimpin yang adil akan menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat merasa hak-haknya dihormati dan dilindungi. Sebaliknya, ketidakadilan dapat memicu konflik sosial, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Menurut pemikiran politik Islam, keadilan juga menjadi indikator keberhasilan suatu negara. Semakin tinggi tingkat keadilan dalam pemerintahan, semakin kuat pula hubungan antara pemimpin dan masyarakat.

#### b. Keadilan dalam Penegakan Hukum

Prinsip keadilan dalam politik Islam menekankan bahwa hukum harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, atau hubungan keluarga. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu di hadapan hukum.

Nabi Muhammad SAW mencontohkan prinsip ini melalui sabdanya bahwa jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi nepotisme ataupun kepentingan politik.

Dalam praktik pemerintahan Islam, para khalifah juga menerapkan prinsip persamaan hukum. Khalifah Umar bin Khattab pernah diprotes rakyat biasa terkait kebijakan pemerintahannya, dan beliau menerima kritik tersebut secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan politik Islam memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.

#### c. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan dalam politik Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite tertentu.

Islam mengatur berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan baitul mal untuk menciptakan pemerataan sosial. Kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Islam harus diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menciptakan keadilan sosial melalui reformasi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara yang transparan. Pada masa pemerintahannya, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga sangat sedikit orang yang layak menerima zakat.

#### d. Keadilan terhadap Non-Muslim

Salah satu karakteristik penting keadilan politik Islam adalah perlindungan terhadap hak-hak non-Muslim. Dalam sejarah Islam, masyarakat non-Muslim tetap memperoleh perlindungan hukum, kebebasan beragama, dan hak sosial sebagai warga negara.

Piagam Madinah yang disusun Nabi Muhammad SAW menjadi contoh awal praktik politik yang menjunjung pluralisme dan keadilan sosial. Dalam piagam tersebut, seluruh kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan budaya.

#### e. Keadilan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban kepada Allah

Dalam Islam, keadilan bukan sekadar kewajiban politik, tetapi juga bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Pemimpin yang berlaku adil akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah, sedangkan pemimpin zalim akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakadilannya.

Kesadaran spiritual ini menjadi pembeda utama antara konsep keadilan Islam dengan sistem politik sekuler. Dalam Islam, keadilan memiliki dimensi moral dan religius sehingga pemimpin tidak hanya diawasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh nilai-nilai ketuhanan.

#### f. Relevansi Prinsip Keadilan dalam Politik Modern

Prinsip keadilan dalam politik Islam tetap relevan dalam kehidupan politik modern. Nilai-nilai seperti persamaan hak, supremasi hukum, perlindungan terhadap rakyat kecil, dan transparansi pemerintahan menjadi kebutuhan utama dalam sistem demokrasi kontemporer.

Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, dan ketimpangan sosial menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pemerintahan modern. Oleh sebab itu, nilai-nilai politik Islam dapat menjadi landasan etika untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Prinsip Syura (Musyawarah)

Istilah Syura berasal dari kata syawara, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Pararel dengan definisi ini, kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.

Syura merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem politik Islam. Musyawarah dipahami sebagai proses konsultasi antara pemimpin dan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Prinsip ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan menghindari praktik kekuasaan absolut.

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya syura dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa urusan kaum mukmin diselesaikan melalui musyawarah. Nabi Muhammad SAW juga menerapkan syura dalam berbagai keputusan politik dan strategi perang. Dengan demikian, syura menunjukkan bahwa

Islam menghargai pendapat masyarakat dan menempatkan pemimpin sebagai pelayan umat, bukan penguasa mutlak.

Dalam praktik politik modern, konsep syura memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi deliberatif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, syura tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariat dan moral Islam.

### **Karakteristik Kepemimpinan Islam dalam Politik**

#### **1. Berorientasi pada Kemaslahatan Umat**

Karakter utama kepemimpinan Islam adalah mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Segala kebijakan politik harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menghindari kerusakan sosial.

Konsep masalah menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan politik Islam. Pemimpin tidak boleh hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

#### **2. Memiliki Integritas Moral dan Spiritual**

Pemimpin Islam harus memiliki akhlak yang baik, jujur, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Integritas moral menjadi faktor penting karena kekuasaan tanpa moral akan melahirkan tirani dan penyalahgunaan wewenang.

Nabi Muhammad SAW merupakan contoh ideal pemimpin yang memiliki sifat siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas). Karakter tersebut menjadi standar etika bagi pemimpin dalam Islam.

#### **3. Mengedepankan Etika Politik**

Etika politik Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Politik tidak boleh dijalankan melalui fitnah, manipulasi, atau tindakan yang merugikan rakyat.

Dalam Islam, tujuan politik tidak dapat menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, praktik politik harus tetap berada dalam koridor moral dan syariat. Pemimpin dituntut menjaga persatuan masyarakat dan menghindari konflik yang dapat merusak stabilitas sosial.

### **D. Implikasi Kepemimpinan Islam terhadap Sistem Politik Kontemporer**

Implikasi kepemimpinan Islam terhadap sistem politik kontemporer dapat dilihat dari semakin berkembangnya wacana politik yang berbasis pada nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem politik modern, kepemimpinan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana memperoleh kekuasaan, melainkan juga sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (masalah) telah banyak dijadikan landasan etis dalam praktik pemerintahan modern, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Konsep kepemimpinan Islam juga memberikan pengaruh terhadap pembentukan sistem pemerintahan yang lebih partisipatif. Prinsip musyawarah dalam Islam dinilai memiliki relevansi

dengan konsep demokrasi modern karena keduanya sama-sama menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pengambilan keputusan politik. Dalam praktiknya, pemimpin dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan publik agar tercipta pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dalam konteks politik kontemporer, kepemimpinan Islam telah mendorong munculnya tuntutan terhadap pemimpin yang memiliki integritas moral dan etika publik. Fenomena krisis kepercayaan terhadap elite politik menyebabkan masyarakat semakin menaruh perhatian pada kualitas moral seorang pemimpin. Nilai-nilai kepemimpinan Islam yang menekankan kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan tanggung jawab dianggap mampu menjadi solusi terhadap praktik politik yang sarat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaruh kepemimpinan Islam juga dapat dilihat dalam upaya menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Sistem politik kontemporer sering menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam perspektif Islam, pemimpin diposisikan sebagai pelindung masyarakat yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat tanpa membedakan status sosial maupun golongan. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan Islam dinilai relevan dalam membangun sistem politik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, penerapan kepemimpinan Islam dalam politik kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi dan perkembangan sistem politik modern telah melahirkan masyarakat yang plural dan multikultural. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam agar tetap dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip toleransi dan keberagaman. Dalam hal ini, pendekatan moderat dan inklusif menjadi penting agar kepemimpinan Islam tidak dipahami secara sempit dan eksklusif.

Implikasi lain dari kepemimpinan Islam terhadap sistem politik kontemporer tampak pada berkembangnya gerakan politik Islam di berbagai negara Muslim. Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk respon terhadap dominasi sistem politik sekuler yang dianggap gagal menghadirkan keadilan sosial. Dalam perkembangannya, sebagian gerakan politik Islam mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi modern melalui jalur konstitusional dan partisipasi politik.

Dalam praktik pemerintahan modern, prinsip akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam juga menjadi perhatian penting. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan selama menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem politik kontemporer memerlukan mekanisme pengawasan dan transparansi agar kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam memiliki hubungan erat dengan konsep *good governance* dalam pemerintahan modern.

Kepemimpinan Islam juga berimplikasi terhadap penguatan nilai kemanusiaan dalam politik kontemporer. Politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan bermartabat. Dalam Islam, pemimpin dituntut untuk mengedepankan nilai kasih sayang, perlindungan hak masyarakat, dan penyelesaian konflik secara adil. Dengan demikian, kepemimpinan Islam dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas politik dan harmoni sosial dalam masyarakat modern.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi pada era kontemporer telah memengaruhi pola kepemimpinan politik Islam. Masyarakat kini lebih mudah mengawasi kebijakan pemerintah dan menyampaikan kritik terhadap pemimpin melalui media digital. Kondisi tersebut menyebabkan pemimpin dituntut untuk lebih terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap aspirasi publik. Dalam perspektif Islam, keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat merupakan bagian dari etika kepemimpinan yang harus dijaga demi terciptanya kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Islam memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap sistem politik kontemporer. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan kesejahteraan sosial masih dipandang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan politik modern. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakat kontemporer agar mampu menciptakan sistem politik yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## **Penutup**

Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam pada dasarnya dibangun atas landasan moral, tanggung jawab, serta amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kedudukan politik semata, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian yang mengandung pertanggungjawaban kepada manusia dan kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki sifat adil, jujur, amanah, bijaksana, serta mampu mengutamakan kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh sebab itu, kepemimpinan Islam memiliki dimensi etis dan spiritual yang cukup kuat dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip dan karakteristik kepemimpinan Islam juga menunjukkan relevansi yang cukup besar terhadap dinamika sistem politik modern. Nilai musyawarah, keadilan, persamaan hak, serta tanggung jawab sosial dinilai masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer yang menuntut pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam praktik politik modern, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta rendahnya integritas pemimpin telah mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada etika dan moralitas. Dengan demikian, prinsip kepemimpinan Islam dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan yang mampu mendukung terciptanya sistem politik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implikasi kepemimpinan Islam terhadap sistem politik kontemporer dapat dilihat dari berkembangnya tuntutan terhadap kepemimpinan yang lebih transparan, inklusif, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti syura, amanah, dan keadilan telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan pola kepemimpinan yang lebih partisipatif dan humanis. Meskipun demikian, penerapan konsep kepemimpinan Islam dalam masyarakat modern tetap memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang moderat dan kontekstual terhadap ajaran kepemimpinan Islam diperlukan agar nilai-nilai tersebut tetap relevan

dalam menghadapi tantangan politik kontemporer tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, pluralisme, dan kehidupan bernegara yang harmonis.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Muin Salim. "Amanah dalam Kepemimpinan Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 7, No. 1, 2020.
- Abdul Muin Salim. "Persamaan Hukum dalam Kepemimpinan Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 7, No. 1, 2020.
- Abu al-A'la al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan*. Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1990.
- Abu al-Hasan al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1979.
- Abul A'la Al Maududi dkk. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 3, No. 1, 2025.
- Ahmad Syafii Maarif. "Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Politik." *Jurnal Politik Islam* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Ahmad Syafii Maarif. "Kesejahteraan Sosial dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Politik Islam* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Ahmad Syafii Maarif. "Reformasi Sosial Umar bin Abdul Aziz." *Jurnal Politik Islam* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Amin Mudzakkir. "Islam dan Politik di Era Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 11, No. 1, 2016.
- Azyumardi Azra. "Etika Kekuasaan dan Kepemimpinan Islam." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol. 11, No. 2, 2020.
- Azyumardi Azra. "Etika Politik dalam Tradisi Islam." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol. 11, No. 2, 2020.
- Azyumardi Azra. "Piagam Madinah dan Pluralisme Politik Islam." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* Vol. 11, No. 2, 2020.
- Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Didin Hafidhuddin. "Etika Keadilan dalam Politik Modern." *Jurnal Dakwah dan Kepemimpinan* Vol. 9, No. 1, 2019.
- Didin Hafidhuddin. "Karakter Amanah Rasulullah dalam Kepemimpinan." *Jurnal Dakwah dan Kepemimpinan* Vol. 9, No. 1, 2019.
- Didin Hafidhuddin. "Karakter Kepemimpinan Rasulullah." *Jurnal Dakwah dan Kepemimpinan* Vol. 9, No. 1, 2019.
- Eka Nuraini Rachmawati. "Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Journal Competency of Business* Vol. 6, No. 2, 2022.
- Fida' Munadzir, Ganang Prihatmoko, dan AA Hubur. "Kajian Siyasah Syar'iyah pada Proses Kepemimpinan." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 1, 2025.
- Haedar Nashir. "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 1, No. 1, 2011.
- Harun Nasution. "Keteladanan Nabi dalam Kepemimpinan Islam." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 3, No. 2, 2018.

- Himyari Yusuf. "Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi bagi Formulasi Politik Kontemporer." *Jurnal Tapis* Vol. 10, No. 1, 2014.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Imam Mahfudli dkk. "Kepemimpinan Islam di Tengah Kontroversi Politik dan Perubahan Zaman." *Jurnal Media Akademik*, 2025.
- Isrofiah Laela Khasanah dan Paryanto. "Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer." *Kutubkhanah* Vol. 23, No. 1, 2023.
- James P. Piscatory. *Islam in a World Nation-States*. New York: Cambridge University Press, 1986.
- John L. Esposito. *Islam and Politics*. Terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- M. Arfah. "Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Literasiologi* Vol. 10, No. 2, 2023.
- M. Din Syamsuddin. "Konsep Keadilan dalam Politik Islam." *Jurnal Sosial Politik Islam* Vol. 12, No. 2, 2019.
- M. Din Syamsuddin. "Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Muslim." *Jurnal Sosial Politik Islam* Vol. 12, No. 2, 2019.
- M. Quraish Shihab. "Konsep Syura dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 5, No. 2, 2018.
- M. Quraish Shihab. "Prinsip Syura dalam Politik Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 5, No. 2, 2018.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mia Al Asyfiyah dkk. "Rekonstruksi Kepemimpinan Islam Dalam Perspektif Tafsir: Dari Konsep hingga Nilai Ideal." *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2026.
- Mulkanasir. "Menyingkap Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 9, No. 2, 2021.
- Nur Fazillah. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training* Vol. 12, No. 1, 2023.
- Nur Khalis Madjid. "Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Prinsip Keadilan." *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 4, No. 2, 2021.
- Nur Khalis Madjid. "Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Perspektif Politik Islam." *Jurnal Peradaban Islam* Vol. 4, No. 2, 2021.
- Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, dan Meyvina Putri. "Kepemimpinan dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern." *Equality: Law and Social* Vol. 1, No. 2, 2025.
- Rahmat Ilyas. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Al-Buhuts* Vol. 18, No. 1, 2022.
- Saipul Umami, Iksir Alkholy Rizman, dan Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih Siyash dalam Kepemimpinan Modern." *Equality: Law and Social*, 2025.
- Salsabila Masshanty Aliefarahma dan Jumiati Sasmita. "Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 8, No. 2, 2025.
- Syahrir Karim. "Islam Ideologis dan Gerakan Politik Islam Kontemporer." *Jurnal Politik Profetik* Vol. 4, No. 2, 2016.

Wahbah Zuhaili. "Etika Politik dalam Islam." *Jurnal Fiqh Siyasah* Vol. 8, No. 1, 2020.

Wahbah Zuhaili. "Keadilan Ekonomi dalam Politik Islam." *Jurnal Fiqh Siyasah* Vol. 8, No. 1, 2020.

Wahbah Zuhaili. "Maslahah dan Kebijakan Politik Islam." *Jurnal Fiqh Siyasah* Vol. 8, No. 1, 2020.

Yusuf Al-Qaradawi. "Keadilan dalam Sistem Politik Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, 2018.

Yusuf Al-Qaradawi. "Keadilan Sosial dalam Sistem Politik Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, 2018.